

Komparasi Munculnya Liberalisme Ekonomi di Indonesia dan Burma*

HATIB ABDUL KADIR

University of California Santa Cruz

Abstract

This paper explores the genealogy of the birth of the economic growth system in Indonesia and Burma. First, it is a major transformation that occurs in both countries in the form of commodification of land, labor and money. And the formation of pluralism in the colonial society. Second, the transformation of capitalism in Burma that enters through the system of bureaucratic governance, education and social order in rural communities. Third, the study of comparative application of economic liberalism in Indonesia and Burma and its social effects. And the emergence of middle class society who came from outside of original community. The author uses Karl Polanyi's approach for looking at the social effects of economic liberalism, based on the transformation of three things: the privatization of the land, the commodification of labor and the emergence of the system of money and debt. This comparison primarily uses extensive data from J.S Furnivall in view of the application of an economic liberalism system which is then enriched with studies from other economic historians, such as Thomas Lindblad, Anne Booth and the study of political economics, Richard Robison.

Keywords:
economic
growth;
privatization;
commodification;
welfare

Abstrak

Tulisan ini menelusuri genealogi lahirnya sistem pertumbuhan ekonomi di Indonesia dan Burma. *Pertama*, adalah transformasi besar yang terjadi di kedua Negara dalam bentuk komodifikasi tanah, buruh dan uang. Serta terbentuknya formasi pluralism dalam masyarakat Negara Jajahan. *Kedua*, transformasi kapitalisme di Burma yang masuk melalui sistem pemerintahan birokrasi, pendidikan dan tata sosial kemasyarakatan di perdesaan. *Ketiga*, kajian komparasi penerapan liberalisme ekonomi di Indonesia dan Burma dan efek-efek sosialnya. Serta munculnya masyarakat kelas menengah yang datang dari luar masyarakat asli. Penulis menggunakan pola pendekatan Karl Polanyi dalam melihat efek-efek sosial dari liberalisme ekonomi, dengan berpatokan pada transformasi tiga hal: privatisasi tanah, komodifikasi tenaga kerja dan munculnya sistem uang dan hutang. Komparasi ini utamanya menggunakan data ekstensif dari J.S Furnivall dalam melihat penerapan sistem liberalisme ekonomi yang kemudian diperkaya dengan studi-studi dari Sejarawan ekonomi lainnya, semacam Thomas Lindblad, Anne Booth dan kajian ilmu politik ekonomi, Richard Robison.

Kata Kunci:
pertumbuhan
ekonomi;
privatisasi;
komodifikasi;
kesejahteraan

* Burma saat ini disebut sebagai Myanmar. Perubahan nama Negara tersebut dilakukan pada tahun 1989 oleh junta militer yang berkuasa saat itu.

Pendahuluan

Tulisan ini menelusuri lahirnya liberalisme ekonomi di Indonesia dengan fokus melacak pada karya babon sejarah ekonomi yakni dua buku yang ekstensif dan melelahkan, dari Furnivall, *Netherlands India: a study of plural economy* (1939) dan *Colonial Policy and Practice: A Comparative Study of Burma and Netherlands India* (1948). Ada begitu banyak karya sejarah ekonomi di Indonesia untuk melacak lahirnya liberalisme di Indonesia (Boomgard, 1990, Booth, 1998, 2007, Lindblad, 1996) namun saya memilih untuk memfokuskan pada dua buku ini dengan salah satu pertimbangan adalah karya ini sangat kritis terhadap liberalisme di Indonesia dan tiga karya ini mempunyai pengaruh yang luas di kalangan akademisi dan pengambil kebijakan, baik selama masa Hindia Belanda maupun Indonesia pasca-kolonial. Di akhir tulisan ini juga akan membahas kelanjutan liberalisme ekonomi pasca kolonial serta pola-pola penerapannya dengan beberapa tambahan kajian literatur ekonomi sosial kontemporer.

Poin pertama yang hendak saya sampaikan adalah, liberalisme ekonomi adalah sebuah ide baru yang berasumsi bahwa semua bentuk ekonomi adalah sama. Semua individu mempunyai hasrat untuk saling berkompetisi dan memaksimalkan keuntungan. Penerapan liberalisme ekonomi jelas ahistoris dan meniadakan bentuk keragaman ekologis, organisasi sosial dan politik. Karena dalam kenyataannya, liberalisme ekonomi berupaya memisahkan kegiatan-kegiatan ekonomi dari relasinya dengan agama, etnisitas, kekerabatan dan organisasi politik (Polanyi, 2001). Sejarah panjang ekonomi di Indonesia tertanam dalam relasi-relasi sosial komunal seperti etnisitas, kekerabatan dan organisasi politik.

Keberlanjutan sejarah yang terjadi hingga saat ini adalah bentuk dasar dari kapitalisme Indonesia sesungguhnya dimana sistem perdagangan berada pada dalam skala kecil dan tidak berbasis monopoli. Namun demikian, sistem perdagangan skala kecil ini cenderung stabil karena ia terkait dengan ikatan sosial dan tidak mengambil keuntungan besar yang selalu paralel dengan resiko hutang dan volatilitas harga-harga pasaran dunia yang cenderung labil. Van Leur (1955) menggambarkan sejarah mendalam (*deep history*) dari sistem ekonomi Indonesia yang bersifat skala kecil dan tidak dikuasai oleh monopoli tertentu. Jika kita perhatikan, keberlanjutan perdagangan dan usaha skala kecil ini masih berkelanjutan hingga sekarang. Ekonomi skala-skala kecil juga mempunyai relasi sosial organisasi yang kuat. Sebaliknya, sistem ekonomi skala besar dan monopolis tidak hanya menciptakan solidaritas mekanis, namun juga mempunyai kekuatan yang merusak model ekonomi skala kecil, sebagaimana yang akan saya gambarkan pada studi kasus Furnivall di bagian kedua.

Poin kedua, saya menekankan bahwa sebenarnya definisi liberalisme atau kebebasan pasar lebih merupakan mitos karena Negara merupakan aktor

utama dalam mengatur mekanisme lalu lintas dan alokasi barang dan sumber daya secara efisien dengan patokan penting pada harga-harga di pasaran. Negara bukan berada *vis a vis* dengan pasar melainkan melakukan negosiasi secara berulang dengan kelas kapitalis. Penerapan liberalisme ekonomi hingga pasca kolonial juga masih diterapkan oleh Negara dan birokrasi sebagai aktor pentingnya. Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 1920 misalnya, disebabkan oleh stimulasi pertumbuhan ekspor di bidang perkebunan teh, tembakau dan gula yang didorong oleh perusahaan-perusahaan swasta Belanda (Booth, 2007: 73-74, 94-98). Negara kolonial memegang peran dalam mengatur semua alur ekspor-impor, seperti kuota dan tarif barang masuk. Tidak itu saja, semua ekspor yang dilakukan Negara koloni lebih ditujukan kepada Negara kolonialnya.

Transformasi Kapitalisme di Hindia Belanda

Jika Van Leur (1955) menggambarkan bahwa perdagangan adalah sistem yang saling berkolerasi dan menguntungkan, Furnivall sebaliknya. Di bukunya *Netherlands India: A Study of Plural Economy* (1939) terbentuknya perdagangan dengan sistem monopoli dimulai dengan agresi dan pembantaian besar-besaran sepanjang abad 16. Studi-studi kasus yang digambarkan oleh Gerrit J Knaap, sejarawan dari Universitas Utrecht, misalnya, dengan sangat gamblang dan detail menggambarkan pembantaian di Banda, Seram dan Maluku Tengah untuk menguasai produksi rempah-rempah dan sekaligus menciptakan sistem ekonomi dengan basis perbudakan pada awal tahun 1600an¹. Demikian pula Furnivall juga menggambarkan penetapan supremasi kekuasaan dan kebijakan ekonomi dijalankan dengan sistem monopoli dan penuh dengan cerita yang berdarah-darah (Furnivall, 1939: 25-36).

Furnivall adalah seorang sosialis demokrat yang mempunyai premis-premis ekonomi harus mempunyai kaitan erat dengan kesejahteraan publik secara luas. Argumentasi awal yang ia sampaikan, peperangan dan budak adalah elemen terpenting dalam melandasi pertumbuhan ekonomi di Negara Jajahan. Satu contoh yang paling jelas adalah cerita pembangunan jalan di Jawa di bawah Daendels. Tapi saya tidak akan menceritakan dengan detail, karena penggambaran tentang Daendels telah banyak diberikan oleh para sejarawan². Sistem pembangunan ekonomi di Jawa selama masa Daendels dilandasi oleh kerja-kerja budak (*unpaid labour*) dengan tekanan di bawah militerisasi. Masa Daendels adalah tahun-tahun kebijakan ekonomi yang

1) Periksa Gerrit J Knaap, 2003, "Headhunting, Carnage and Armed Peace in Amboina, 1500-1700". *Journal of the Economic and Social History of the Orient*. Vol 46. No. 2, 165-192

2) Periksa catatan mengenai Daendels di "Well, Kathirithamby, "The Age of Transition: The mid-Eighteenth to the Early Nineteenth Century", hal 599-600 dalam Nicholas Tarling (ed), 1992, *The Cambridge History of Southeast Asia: From early times to c. 1800, Volume 1*, Cambridge University Press. Merle Calvin Ricklefs. 2001. *A History of Modern Indonesia Since C. 1200*. Third Edition. Stanford University California.

membbingungkan. Namun pada tahun 1815 dan seterusnya, pemerintah kolonial mulai menemukan wajahnya dalam membentuk sistem ekonomi, yakni dengan mengatur sistem-sistem liberal ala Adam Smith (1990). Prinsip-prinsip dasarnya adalah dengan melakukan peningkatan produksi yang dianggap mampu meningkatkan kapasitas daya beli petani. Tahun 1815 ke atas, masyarakat, khususnya di Jawa mulai diperkenalkan bagaimana memproduksi tanaman pangan, dengan melebihi apa yang selama ini hanya dikonsumsi.

Dalam sistem liberalisme di Hindia Belanda, pemerintah mempunyai peranan penting dalam menciptakan *supply and demand* dengan cara mengontrol dan membentuk pasar. Melalui kuasa administrasi dan monopoli sektor tertentu, Negara menciptakan modal melalui pajak, sewa dan persediaan buruh murah. Contohnya tersebar dimana-mana, seperti kontrol penanaman rempah-rempah di kawasan pulau tertentu di Maluku agar harganya tidak jatuh di pasaran dunia, kemudian regulasi produksi gula di Jawa Barat dan kontrol produksi lada di Sumatera Selatan adalah bukti bahwa control dan monopoli Negara terhadap sumber daya tanah dan alam (Furnivall, 1939: 31, 33, 39)

Transformasi terpenting adalah masyarakat kolonial mulai diperkenalkan dengan menanam tanaman yang tidak untuk dikonsumsi sehari-hari oleh mereka, seperti kopi dan tanaman indigo. Daerah *frontier* yang melakukan itu adalah kawasan Priangan di Jawa Barat. Disinilah kemudian, liberalisme ekonomi di Indonesia menghasilkan wajah dualismenya dimana masyarakat koloni mulai mengenal tanaman untuk konsumsi pribadi dan tanaman yang mampu menghasilkan uang kontan. Di sisi lain, meningkatnya produksi karena disebabkan tingginya peningkatan populasi, dan bukan karena peningkatan intensifikasi teknologi.

Catatan lain yang penting adalah, munculnya modal-modal dari luar yang dialokasikan untuk investasi tembakau dan teh. Peningkatan modal dan kemajuan ekonomi di tahun-tahun 1815 dan satu dekade setelahnya meningkatkan kemampuan impor Hindia Belanda, tapi pada barang-barang mewah, kecuali peningkatan impor terjadi pada katun dan garam yang lebih digunakan untuk konsumsi masyarakat pribumi (*native*). Dengan demikian, dalam sistem ekonomi liberal, kemajuan ekonomi tidak berbanding lurus dengan perkembangan ekonomi pada masyarakat bawah.

Kesenjangan antar kelas dan ras diperburuk pada sistem tanam paksa pada pertengahan abad 19 menyebabkan ekonomi masyarakat pribumi semakin tertinggal dibanding kelas menengah Cina dan masyarakat Eropa. Sepanjang tahun 1815 hingga 1830, jumlah aparatus administratif dan jenjang-jenjangnya semakin meningkat, yang bertujuan untuk mengatur administrasi populasi dan pajak (ibid, 191). Jawa juga mensuplai kuli murah yang dianggap sebagai aset kemajuan ekonomi karena penduduk mereka mempunyai penduduk yang padat dibanding kepulauan lainnya (ibid, 289-290, 349). Di bawah sistem

tanam paksa, Jawa mempunyai peranan signifikan dalam memproduksi produk-produk komoditas global semacam tembakau, teh, dan tanaman indigo.

Transformasi terpenting pertama adalah terciptanya individu sebagai “buruh” yang diupah atas pekerjaannya di pabrik-pabrik gula dan perkebunan teh maupun tembakau. Mengacu pada Karl Polanyi dalam *The Great Transformation* (1944), asal-usul definisi “orang miskin” muncul setelah individu didefinisikan pada sistem bekerja dan menganggur (employment-unemployment). Orang yang miskin adalah orang yang menganggur, karena ia tidak memproduksi dan terserap dalam masifikasi perkebunan dan pabrik yang dibangun oleh sistem koloni. Maka dari itu buruh mengkomoditaskan dirinya ke dalam kantong-kantong perkebunan dan pabrik.

Perbedaan dengan tahun 1815 dengan 1870 adalah, sistem buruh bersifat konsensual, dibanding tahun 1815 dimana sistem buruh adalah bersifat paksaan. Sejak saat ini pula, nasib buruh sangat tergantung dengan fluktuasi harga di pasaran global, misalnya upah mereka menurun ketika harga gula di pasaran dunia menurun. Pada era ini bukan hanya menghasilkan kompetisi individu, namun juga kerentanan tiap individu diluar batas kuasanya. Seiring dengan komodifikasi buruh, terjadi pula komodifikasi tanah, dimana para pemilik modal diijinkan untuk menyewa tanah dari penduduk pribumi selama lima hingga 20 tahun. Masyarakat pribumi “mulai menyadari” bahwa tanah mempunyai nilai (value) yang dapat dipertukarkan secara individu.

a. Komodifikasi Buruh dan Tanah

Catatan liberalisme di Indonesia yang paling penting adalah sepanjang tiga puluh tahun dari, 1870 hingga 1900. Liberalisme bukan lagi sebuah ajakan, gerakan atau mazhab, melainkan ia telah mewujud menjadi kebijakan pemerintah. Ada banyak transformasi terpenting pada tahun-tahun ini. Era liberalisme sesungguhnya adalah terjadi pada tahun 1870 hingga 1900 yang ditandai dengan masifnya komersialisasi buruh, tanah dan alam seperti hutan dan mineral. Pemerintah Hindia Belanda membuka investasi untuk perusahaan swasta yang menjalankan bisnis di bidang perkebunan, pertambangan, dan kayu di luar pulau Jawa. Sedangkan di Jawa, tanah-tanah disewakan untuk penanaman tanaman komersial (*cash crops*). Jumlah buruh yang meningkat bekerja di perkebunan, pabrik-pabrik dan rel kereta api. Maraknya aktivitas perkembangan ekonomi diiringi pula dengan meningkatnya infrastruktur perkapalan, komunikasi, pegadaian dan aktivitas ekspor dan impor. Liberalisasi ekonomi juga mendorong masyarakat kehilangan tanahnya dan masuk ke dalam sistem buruh upahan (Booth, 2007: 60-5).

Setelah Jawa mengalami intensifikasi perkebunan dan pertanian sepanjang tahun 1815-1860an, transformasi kedua adalah munculnya penanaman modal pada tambang timah, batubara, dan hasil hutan di luar Jawa (baca: *Outer Islands*) semacam Kalimantan Barat dan Selatan, Saparua dan

Seram di Maluku dan sepanjang pantai timur Sumatera, seperti Pantai Timur Sumatera, Bangka dan Belitung. Pertumbuhan investasi di luar Jawa ini diiringi dengan terciptanya bank, dimana semua aliran investasi dan perputaran laba investor disimpan dalam bank-bank baru seperti *Hongkong and Shanghai Banking Corporation*, *N1 Handelsbank*, dan *Koloniale Bank*. Pertumbuhan ekonomi bias pada pembagian modal di kalangan atas yang sebenarnya sama sekali tidak mengimbas pada masyarakat pribumi. Sebagai misal adalah kesepakatan yang dibuat oleh investor minyak semacam perusahaan *Shell Co* dengan *Royal Dutch Co.*, yang melakukan konsesi bagi hasil minyak 40 persen pada pihak pertama dan 60 persen pihak kedua. Konsesi ini sama sekali tidak menyentuh bagian terbawah masyarakat, namun secara hitam di atas putih mempunyai peran penting dalam perhitungan pertumbuhan ekonomi. Sedangkan kontribusi pertumbuhan ekonomi masyarakat pribumi tidak lain dan tidak bukan adalah hanya pada persediaan tenaga kerja buruh yang murah.

Transformasi liberalisme di Hindia Belanda menghasilkan modal yang melimpah namun juga keragaman sosial masyarakat yang didasarkan pada perbedaan ras. Penanaman modal, mendorong orang untuk bermigrasi ke wilayah Hindia Belanda. Namun, keragaman ekonomi yang terdiri dari masyarakat Eropa, Cina dan pribumi tidak menghasilkan percampuran relasi sosial. Liberalisme menghasilkan tingginya tingkat kemiskinan pada masyarakat pribumi. Upah buruh habis untuk biaya konsumsi sehari-hari dan membayar sewa tanah atau tempat tinggal dimana mereka bekerja. Liberalisme ekonomi juga memberi jargon manusia untuk hidup bebas, namun masyarakat pribumi terkungkung dalam transformasi baru dimana mereka terjerat hutang, tenaga kerja dihitung berdasarkan nominal, dan tercerabut dalam kehidupan organisasi sosial yang bersifat organik.

Sepanjang tahun 1800-1900, liberalisme justru menghasilkan reaksi keras di kalangan masyarakat. Ada ratusan pemberontakan yang muncul karena bereaksi terhadap pola-pola privatisasi penyewaan tanah, kompetisi individu dan modernisasi sistem administrasi. Munculnya cerita pemberontakan Imam Bonjol di Sumatera Bagian Barat (1803-1838), Pattimura di Maluku Tengah (1817), Antasari di Kalimantan Selatan (1862) adalah cerita-cerita populer reaksi terhadap liberalisme. Demikian pula, munculnya gerakan ekonomi politik Sarekat Islam di awal abad dua puluh misalnya, adalah reaksi keras terhadap kondisi liberalisme ekonomi yang tidak menguntungkan untuk penduduk dan pedagang pribumi. Kebijakan otonomi atau desentralisasi, dibukanya suara rakyat melalui *volksraad*, dan terbukanya akses pendidikan menghasilkan semacam kebangkitan nasionalisme di kalangan terdidik yang sebenarnya tetap merupakan reaksi keras terhadap *laissez faire* pemerintah. Selain tentunya kebijakan-kebijakan hukum yang diskriminatif. Salah satu akibat terbesar dari pertumbuhan ekonomi liberalisme adalah semakin tingginya jurang pemisah antara orang kaya yang notabene adalah para

komunitas Eropa dengan masyarakat pribumi. Masalah yang semakin mengkhawatirkan ini disikapi dengan memunculkan kebijakan politik etik nantinya selepas tahun 1900.

b. Program Ekonomi yang Membentuk Formasi Sosial

Formasi masyarakat plural di Hindia Belanda adalah karena hasil dari pertumbuhan modal dan buruh pribumi yang bersama-sama dan didukung oleh investasi modal luar negeri. Kombinasi ini menyebabkan konflik kepentingan ekonomi yang dipertajam dengan benturan ras dan etnik. Berbeda dengan di Eropa, liberalisme ekonomi di Indonesia beranggapan bahwa modal berasal dari luar, sedangkan buruh berasal dari dalam karena tingginya tingkat populasi, menyebabkan murahnya suplai tenaga kerja. Sedangkan di luar pulau Jawa, seperti Sumatera, baik modal dan buruh didatangkan dari luar³. Namun esensi yang terjadi adalah tetap, dimana upah minimum buruh kontrak tak lebih dari alokasi untuk konsumsi dan sewa tempat tinggal. Sedangkan buruh pribumi secara struktural mengalami kesulitan untuk mengubah skala perdagangannya dari *retail* (eceran) ke *wholesale* (skala borongan), karena komunitas-komunitas Cina telah menguasai perdagangan dalam skala yang lebih besar, beserta alat produksinya (Furnivall, 1939: 406).

Selama masa tanam paksa hingga khususnya liberalisme, tidak mendukung pertumbuhan ekonomi pada masyarakat pribumi. Dengan kata lain, Furnivall hendak menegaskan bahwa makna dari masyarakat yang plural mengacu pada dua hal, yakni ras dan kelas atau perbedaan pendapatan (ibid, 212). Meskipun orang Cina dilarang untuk memiliki tanah, mereka mendapatkan kebebasan untuk melakukan perdagangan, menyediakan hutang dan persewaan alat-alat produksi. Komunitas Cina mendapatkan untung dari perdagangan jumlah besar dan eceran. Dan yang terpenting, dominasi kelompok Cina mempunyai daya untuk mencegah masyarakat pribumi dalam berpartisipasi di dunia industri dan perdagangan skala besar, kecuali hanya bekerja sebagai kuli atau petani. Akibatnya, tidak seperti masyarakat Eropa ataupun Cina yang semakin kaya, ekonomi masyarakat pribumi tetap jalan di tempat. Upah-upah buruh pribumi dibayar dengan gaji yang cukup untuk hidup subsisten. Pada saat yang sama, populasi di Jawa berkembang dengan sangat pesat, jauh lebih pesat dibanding sumber daya yang ada, seperti produksi makanan dan ternak. Di titik inilah kemudian, pemerintah mensuplai jenis produksi makanan semacam ubi kayu yang sebenarnya merupakan politik pangan untuk menurunkan standar upah karena ubi jauh lebih rendah dari beras.

3) Periksa Ann Laura Stoler. 1995. *Capitalism and Confrontation in Sumatra's Plantation Belt, 1870-1979*. University of Michigan Press; Second edition (December 15). Stoler juga menunjukkan bahwa migrasi buruh Jawa ke perkebunan mendatangkan ketegangan-ketegangan antara buruh migran dengan peminjam uang, yang notabene orang Cina. Namun, berlawanan dengan Furnivall, Stoler berpendapat bahwa dibalik keterpisahan antar ras dan kelas antar buruh pendatang dengan pemilik modal, masih terjalin relasi sosial dalam bentuk pernikahan dan hubungan gelap antar ras.

Akibat dari liberalisme menghasilkan kesenjangan sosial yang bersifat rasial. Furnivall percaya bahwa liberalisme mengorganisir masyarakat berdasarkan mode produksi dibanding dorongan menciptakan relasi sosial organik. Dengan kata lain, perbedaan tingkat pendapatan diaksentuasi oleh perbedaan ras dan kehidupan sosial. Saudagar adalah jenis pekerjaan yang didominasi oleh orang-orang Cina, sedangkan masyarakat pribumi banyak bergelut sebagai pekerja di tingkat pertanian dan kuli. Tidak seperti J.H Boeke (1953) yang menganggap bahwa ekonomi masyarakat Hindia Belanda yang didasarkan pada dual ekonomi, Furnivall mengindikasikan bahwa masyarakat Hindia Belanda terdiri dari tingkatan kebudayaan dan mode produksi yang lebih kompleks pada tahap ekonomi liberal hingga awal abad 20.

Dibanding ulasannya tentang Burma, karya Furnivall tentang liberalisme di Hindia Belanda tidak begitu membahas tentang efek-efek sosial yang diakibatkan oleh penerapan ekonomi pembangunan. Ulasan selanjutnya akan membahas perubahan relasi sosial yang terjadi dari munculnya pertumbuhan ekonomi dan liberalisasi di karya Furnivall selanjutnya yang jauh lebih baik dan matang, *Colonial Policy and Practice: A Comparative Study of Burma and Netherlands India* (1948). Furnivall menulis buku ini kurang lebih 10 tahun setelah ia berpindah dari Indonesia ke Burma.

Praktik Liberalisme dan Pertumbuhan di Burma

Bagaimana liberalisme ekonomi diterapkan di dua Negara jajahan yang berbeda dengan dua Negara peng-koloni yang berbeda pula? Studi kasus yang menarik kali ini adalah tentang Burma dan Hindia Belanda. Inggris dan Belanda menerapkan dua metode yang berbeda dalam menjalankan pemerintahan mereka di Negara koloni. Inggris menjalankan sistem pemerintahan langsung atau disebut *direct rule*, untuk menerapkan prinsip institusi-institusi di Eropa kepada masyarakat pribumi. Sedangkan Belanda menerapkan sistem pemerintahan tidak langsung atau disebut *indirect rule*, yang tersusun dari dualisme sistem administrasi, setengah menerapkan institusi Barat dan setengah pada kebijakan-kebijakan adat (*half-western and half-tropical*). Meskipun keduanya berbeda, tapi tujuan utamanya adalah sama yakni mengembangkan pertumbuhan ekonomi (Furnivall, 1948: 276-77).

Burma adalah tempat yang secara geografis terpencil dan lebih terisolasi dari Indonesia. Mengingat daerah ini cukup terpencil, maka ia tidak menjadi kawasan yang penting sebagai tempat strategis untuk perdagangan. Hasil utama dari Negara ini hanyalah pohon Jati. Dibanding Hindia Belanda, Burma adalah Negara yang jauh lebih miskin.

a. Ekonomi Sosial: Komodifikasi Buruh, Tanah

Sebelum kedatangan koloni Inggris di Burma, rahib dan ketua-ketua adat mempunyai kekuasaan di desa. Sifat kekuasaan sangatlah konkrit dan

personal. Setelah menganeksasi kawasan-kawasan penting seperti Arakan, Tenasserim dan Pegu, Inggris mulai mengimplementasikan sistem perdagangan bebas rentang waktu 1826-1852. Hal pertama yang mereka lakukan adalah memperkenalkan sistem hukum sebagai kode untuk orang Burma, baik itu dibidang kriminalitas, pernikahan hingga aturan pendapatan. Inggris mulai menerapkan metode fiskal dengan cara menarik pajak tanah dan tanaman. Tiap individu mendapatkan pajak 10% dari produk tanaman komersial. Hal ini berbeda dengan Hindia Belanda, dimana selama masa tanam paksa, pemerintah cenderung mengharuskan masyarakat untuk memberikan tenaga pelayanannya dibanding membayar uang melalui pajak. Orang Burma ikut andil dalam kerja-kerja tanam paksa. Inggris sadar mereka kekurangan tenaga kerja di Burma, bukan hanya karena jumlah penduduk yang sedikit, namun banyak penduduk yang lari menghindari kolonisasi dan perbudakan ketika Inggris masuk ke kawasan Burma. Langkah yang dilakukan Inggris adalah mengimpor kuli dari India. Pemerintah India mempunyai pengalaman dalam mengkoloni India sebelumnya. Furnivall (1948:60) melaporkan bahwa setidaknya terdapat 25 ribu orang India di kota Tenasserim pada awal abad 19. Pada tahun 1880, keberadaan kuli dari Madras dan Bengali meningkat pesat di kota-kota seperti Rangoon. Mereka mencapai hingga 40 ribu. Pemerintah tidak lagi mensubsidi kuli-kuli ini, sehingga mereka berstatus sebagai "tenaga kerja lepas". Liberalisme ekonomi selalu diikuti dengan tingginya urbanisasi karena masyarakat yang tercerabut dari tanah, dan khususnya di Negara kolonial dan dunia berkembang adalah terciptanya lahan-lahan baru untuk pembangunan perkebunan dan pertambangan.

Kota-kota di Burma kemudian menjadi kumuh karena dipenuhi oleh para kuli-kuli yang tinggal di kawasan pemukiman dengan sanitasi yang buruk. Tingkat kematian akibat penyakit menular juga demikian tinggi. Namun demikian, banyak pula para migran Indian yang bekerja sebagai sipir, juru tulis di kantor pos. Di Ibu kota Rangoon sendiri, jumlah orang India mencapai hampir 60% menguasai sektor-sektor pekerjaan kelas menengah seperti pegawai dan tenaga ahli (Furnivall, 1948:, 158). Orang-orang kaya dan kelas menengah di Burma hampir semuanya bukan orang Burma asli. Kondisi ini diperburuk dengan hampir tidak ada orang Burma yang duduk di dewan perwakilan karena hampir semuanya dikuasai oleh orang-orang, India, Cina, Eropa dan orang Karen (masyarakat Burma yang tidak ingin dianggap sebagai orang Burma karena mendapatkan pendidikan yang lebih tinggi dan memeluk agama Kristen).

Orang Burma mulai diperkenalkan dengan kegiatan ekspor dan jumlah ekspor mulai mengalami peningkatan pada tahun 1852-1853. Burma mulai mengeksport beras, katun dan juga hasil kayu. Meningkatnya tanaman komersial untuk ekspor mengindikasikan pula bahwa orang Burma harus memproduksi sesuatu yang lebih dari apa yang biasanya ia konsumsi. Barang-

barang yang diimpor juga mengindikasikan meningkatnya pemegang modal asing pada aktivitas-aktivitas ekonomi skala besar.

Liberalisme ekonomi memperkenalkan sistem monetisasi dimana uang kas menjadi alat dominan pertukaran. Monetisasi tidak hanya terjadi di ketika masyarakat memerlukan barang impor seperti ikan, garam dan pakaian, namun juga terjadi ranah tanah dan buruh yang terkomodifikasi. Semenjak tanah dikomodifikasikan, masyarakat desa mulai terjebak hutang karena mereka harus tinggal di tanah-tanah yang disewakan. Demikian juga penyewa tanah (tenant) yang merekrut pekerja juga terjerat hutang terhadap pemilik tanah (*landlord*). Salah satu cara untuk mendapatkan uang kas adalah berhutang pada lintah darat orang-orang India (*chettyars*) ataupun Cina yang menjadi peminjam uang (*money lender*) (Namun demikian, pemerintah mencegah kelas menengah Burma untuk menjadi peminjam uang dalam skala besar. Pemerintah tetap menekan kelas menengah untuk bergerak di skala ekonomi menengah.

Di bawah program pertumbuhan ekonomi, para penanam dan penyewa tanah dirangsang untuk terus meminjam uang, kemudian mereka distumulasi untuk menanam tanaman komersial agar untuk mendapatkan pendapatan kas dan mampu membayar hutang, dan tentunya, mampu membeli barang-barang impor untuk kebutuhan individu, seperti pakaian katun. Selain itu ketika mereka mendapatkan uang kas dari hasil tanaman komersial, penanam atau penyewa cenderung menambah jumlah pekerja atau memperpanjang usia sewa tanah. Baik Inggris maupun Belanda selama masa liberalisme ekonomi merangsang pertumbuhan ekonomi dengan cara memasok uang kas lebih banyak, sehingga masyarakat terjebak ke dalam sistem hutang yang akut.

Pertumbuhan ekonomi di Burma ditandai dengan pembangunan jalan kereta api, jalan raya, bank, dan pendidikan. Rentang waktu antara tahun 1870-1923 adalah masa pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan. Sejak dibukanya Terusan Suez dan perdagangan bebas, pemegang modal di Eropa mulai terlibat dalam investasi pertambangan, minyak dan perkebunan karet pada tahun 1886. Investasi Amerika Serikat mulai masuk, dengan menggunakan sistem pompa minyak buatan Amerika, kapasitas produksi minyak mulai meningkat pesat. Setelah tahun 1871, transportasi darat mulai berjalan baik. Jalan raya dari arah barat ke timur. Daerah-daerah pelabuhan mulai dibuka, sehingga mampu menghubungkan Rangoon, ibukota Burma ke Liverpool, Tokyo dan Kalkutta. Sejak 1870 dan seterusnya, sistem perdagangan bergeser dari yang menggunakan arus sungai ke bentuk transportasi baru.

b) Struktur Administrasi, Hukum dan Pendidikan

Inggris datang ke Burma cenderung sedikit terlambat. Di awal abad 19, Burma masih menjadi bagian dari Provinsi India. Di Burma, prinsip dasar kebijakan pemerintah colonial Inggris ada dua macam: kebebasan ekonomi dan tata

aturan hukum (*economic freedom and rule of law*). Dalam sistem administasrinya, Inggris menekankan apa yang disebut sebagai *self-governing institutions*, dimana administrasi pemerintahan dipecah ke dalam otonomi-otonomi desa model baru dengan tanpa mempertimbangkan kesatuan ikatan sosial organik yang sudah ada sebelumnya. Selain itu, Inggris juga menciptakan struktur kecamatan dengan mengakuisisi tanah. Di tingkat desa, Inggris memecah pusat kekuasaan biara ke dalam kantong-kantong baru yang berdasarkan profesionalitas, seperti munculnya departemen sanitasi, kesehatan publik dan pendidikan.

Sistem otoritas yang sebelumnya personal menjadi impersonal seiring dengan diperkenalkannya sistem pengadilan, polisi sebagai kekuatan pengawas, dan sistem administrasi desa. Di kawasan Pegu misalnya, semua aturan tanam paksa dibagi ke dalam lima distrik, masing-masing berada di bawah deputi komisioner. Distrik tersusun dari para pejabat rendah, hakim, dan penarik pajak. Sedangkan kepala desa (*thugy*) hanya mempunyai peranan tambahan karena semua jabatan dalam mengumpulkan pajak pendapatan sebagian besar diambil alih oleh polisi desa. Desa-desanya di Burma hanya menjadi kesatuan semata pada akhirnya. Desa-desanya yang sebelumnya terikat dalam komunitas berubah menjadi sekumpulan individu yang ramai dan saling berkompetisi satu dengan lainnya. Orang Burma tidak lagi mempunyai ikatan sosial, melainkan mereka lebih terikat pada peminjam uang yang berasal dari luar. Para pemilik toko, pedagang, broker, dan saudagar, yang didominasi oleh Orang Cina dan India, membeli tanah untuk mengontrol suplai padi.

Inggris membuat model pemerintahan mandiri (*self-government*) dengan cara menciptakan kotapraja yang didukung oleh pegawai dan hakim-hakim lokal. Tidak semua orang di kota mereka tinggal mengenal siapa yang berkuasa. Berbeda dengan pegawai sipil di Hindia Belanda yang diberikan kursus selama sekitar lima tahun sebelum mereka datang ke Negara jajahan. Pegawai pemerintahan Belanda juga tidak mempunyai otoritas eksekutif dan hak istimewa secara hukum, sedangkan pegawai Inggris hampir tidak mempunyai pengalaman-pengalaman praktik mengenali kehidupan masyarakat pribumi dan ketika mereka di kirim ke Burma, mereka bekerja sebagai tenaga profesional modern di bidang hukum dan pengumpul pajak. Di Burma, ada jarak dan pembatas yang kuat antara pegawai sipil dengan masyarakatnya.

Sistem desa banyak yang berubah, dari unit-unit sosial menjadi unit-unit administratif. Kepala desa yang dulunya bersifat turunan digantikan oleh administrasi lokal yang lebih bersifat mekanistik. Bahkan kepala desa ditentukan berdasarkan siapa pembayar pajak terbesar. Situasi di desa berubah dari kehidupan yang organis menjadi individu yang saling berkompetisi. Setiap penduduk desa diberikan haknya untuk menanam tanaman komersial. Bukan hanya itu, ketika kepala desa hendak memperluas ekspansi tanahnya, tidak ada opini publik yang mampu mencegahnya. Sebelum kedatangan Inggris, orang

Burma tidak mengenal konsep tuan tanah. Status tanah adat dimiliki secara komunal dan pembayaran berdasarkan tribut dan jasa pelayanan. Para petani menikmati hak istimewa dengan menanam dan mengirimkan tributasinya kepada biarawan dan kerajaan.

Hukum modern menggantikan hukum moral (*Dhammahats*) yang menjadi prinsip etika dalam relasi sosial di Burma (Furnivall, 1948: 132-34). Sistem pemerintahan yang bersifat warisan dipecah ke dalam organisasi politik desa yang dipilih langsung oleh pemerintah Inggris. Sistem administrasi Inggris mengebiri kekuatan kerajaan dan sistem kepemimpinan lokal yang bersifat warisan. Pengumpulan pajak terhadap kerajaan yang sebelumnya menjadi suatu keharusan, menjadi illegal dimata pemerintah.

Furnivall sebenarnya mengakui bahwa tidak begitu ada perbedaan tajam antara sistem pemerintahan langsung dengan sistem pemerintahan tak langsung (*no sharp line distinction of direct and indirect*) (ibid, 276-77). Namun, khususnya di bidang hukum, pemerintah Inggris mempunyai sistem yang lebih tegas dan ketat. Inggris benar-benar menanam jenjang hukum modern dalam bentuk *magistrates, judges* dan *servant of law* dalam tata kelola masyarakat. Sedangkan pemerintah Hindia Belanda masih masih memelihara hukum masyarakat adat. Meskipun demikian, kesamaan antara keduanya adalah hukum modern yang dibuat bukan datang dari kehendak sosial masyarakat. Berbeda dengan di masyarakat Barat, dimana hukum adalah ekspresi sosial yang merupakan hasil dari keinginan masyarakat itu sendiri, sedangkan hukum di Negara koloni bukan dari keinginan sosial masyarakat. Hukum cenderung merugikan karena memecah tatanan sosial, mendisintegrasikan kekuatan organik masyarakat ke dalam atom-atom individu dan menyebar kemiskinan. Dengan demikian, keinginan sosial dalam masyarakat Negara koloni adalah hasil dari konstruksi ekonomi politik dibanding cerminan dari kehendak sosial.

Di samping itu, sistem pendidikan monastik, tidak lagi dianggap sebagai agen pelatihan moral mengingat pendidikan-pendidikan keahlian bersifat sekuler mulai diperkenalkan. Ketika sekolah modern pertama kali dibuka pada tahun 1862. Pada awalnya tidak banyak orang Burma yang tertarik, karena mereka masih melihat biarawan punya peran penting dalam pendidikan tradisional. Namun, mengingat waktu sebelumnya, pada tahun 1833 biarawan dikebiri fungsinya, sedikit demi sedikit peran ini mulai tergantikan. Khusus untuk agama dan ekonomi terpisahkan dari kehidupan sosial dan kultural. Liberalisme ekonomi benar-benar menciptakan modernitas dan individualisme sehingga tercipta batas yang tajam dengan dunia tradisionalitas. Penerapan pemisahan antara dunia modernitas dan tradisional ini paling tampak dalam sistem pendidikan dan birokrasi pemerintahan.

Implikasi Sosial dari Liberalisme dan Pertumbuhan Ekonomi

Berbeda dengan pemerintah Inggris di Burma, pemerintah Hindia Belanda menerapkan kebijakan ekonomi politik dengan masih memperkuat otoritas personal. Sistem pemerintahan tidak langsung (*indirect rule*) tersusun antara dualisme sistem administrasi, setengah Barat dan setengah pribumi. (*half-western and half-tropical*). Tidak seperti Inggris, Belanda tidak mengubah sistem pemerintahan tradisional dan hukum adat. Mereka menjaga hukum adat dan merawat tanah agar tetap masih di tangan masyarakat pribumi. Dengan demikian, desa masih menjadi satu kesatuan sosial yang utuh.

Namun demikian, sistem pemerintahan langsung maupun tak langsung dalam liberalisme ekonomi gagal untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pribumi, meskipun kedua pemerintah ini berhasil mencapai pertumbuhan ekonomi. Dengan kata lain, Belanda dan Inggris gagal memparalelkan antara pertumbuhan ekonomi (*economic progress*) dan kesejahteraan (*welfare*). Hampir semua proyek-proyek humanitarian seperti kesehatan dan pendidikan juga tidak menghasilkan kesetaraan pembangunan. Sebagai konsekuensinya, jarak struktur sosial berdasarkan ras dan ekonomi semakin meluas yang menyebabkan munculnya semangat nasionalisme sebagai ide yang mengusung akses dan hak warga Negara pribumi.

a. Munculnya krisis sosial

Tidak seperti di Barat, dimana hukum adalah ekspresi sosial dari keinginan masyarakat itu sendiri, di Burma, hukum ditempatkan kepada masyarakat dari suatu administrasi yang datang dari luar. Dengan kata lain, masyarakat menganggap bahwa hukum Barat bukanlah hasil dari ekspresi dan keinginan sosial masyarakat pribumi karena produk hukum justru memecah ikatan sosial yang telah ada dan mendisintegrasi organisme kesatuan masyarakat ke bentuk individu-individu yang atomik. Hukum (*legal law*) mempunyai pandangan yang berbeda dengan nilai moral (*moral values*) dalam masyarakat. Masyarakat juga ditarik dari tanah yang merupakan bagian dari kesatuan organisasi sosial. Sistem pemerintah mandiri (*self-governing systems*) justru menggiring masyarakat ke arah pertumbuhan ekonomi yang penuh dengan hutang, dan korupsi. Efek sosial dari perubahan sistem administrasi dan ekonomi adalah banyaknya masyarakat yang diseret dalam proses pengadilan, terlibat dalam kriminal dan kerusuhan. Misalnya, Furnivall mencatat bahwa selama tahun 1920 hingga 1930, jumlah kerusuhan yang dimotori oleh pendeta Buddha meningkat tajam, demikian juga kerusuhan anti India. Orang Burma sadar bahwa meski ekonomi meningkat tajam, namun mereka kehilangan kohesi sosialnya. Di Jawa yang penduduknya mencapai 70 juta pada tahun 1930, jarang sekali ditemukan kasus-kasus litigasi (proses pengadilan) dan hukuman mati dibandingkan dengan kasus-kasus di Burma dengan penduduk yang lebih sedikit. Efek dari liberalisme adalah memecah soliditas komunal masyarakat

menjadi individu-individu yang saling berkompetisi. Pada sisi yang lebih buruk, tiap orang bukan hanya saling bersaing, tapi saling menuntut satu sama lain di pengadilan.

Menariknya, Furnivall mencatat bahwa jumlah korupsi meningkat, namun hampir tidak melibatkan orang-orang Burma di tingkatan pegawai menengah. Korupsi terjadi karena pegawai sipil tidak mempercayai etika *Dhammasat* sebagai prinsip dasar agama Buddha, dan juga korupsi terjadi karena terdapat kerenggangan antara hukum modern dan kepercayaan terhadap adat istiadat. Karena itu korupsi banyak terjadi di departemen-departemen yang berhubungan dengan modernitas pelayanan sosial namun bersifat “sekuler” seperti departemen ekspor-impor, departemen perdagangan, bagian urusan rel kereta api, sanitasi dan kredit koperasi. Namun menariknya, Sebaliknya, korupsi terendah justru di departemen pertanian dimana pegawai pribumi masih bisa menerapkan pola kebijakan yang menyangkut dengan nilai-nilai kultural masyarakatnya (Furnivall, 175-77, 427). Di samping itu, obat untuk kemajuan ekonomi, Inggris membuka sekolah-sekolah modern, menggantikan sistem sekolah kebiaraan yang dianggap ketinggalan jaman. Sekolah-sekolah teknik (*vocational schools*), sekolah teknik agrikultural, sekolah sains, dibuka pada awal dekade tahun 1900an.

Burma mempunyai efek liberalisasi ekonomi yang jauh lebih buruk daripada di Hindia Belanda karena sistem pemerintahan langsung (*direct rule*) yang merombak tatanan sosial ekonomi secara ekstrim. Implikasi sosial dari transformasi masyarakat dari unit sosial organis ke model kompetisi individu dan terjeratnya masyarakat ke dalam hutang adalah meningkatnya keterlibatan masyarakat dalam proses-proses sengketa di pengadilan dan aktivitas kriminal yang serius. Furnivall mencatat pula meningkatnya hukuman mati. Kasus-kasus kriminal terkait perampokan dan pembunuhan karena sengketa tanah juga meningkat tajam⁴.

Implikasi lainnya adalah menyebarnya kasus kelangkaan pangan dan kelaparan. Seperti di Hindia Belanda, semenjak diperkenalkan uang kas, masyarakat jajahan tergiur untuk berkonsentrasi menanam tanaman komersial dibanding tanaman untuk kebutuhan pokok. Hal ini karena tanaman kebutuhan pokok tidak menghasilkan uang kas sebanyak tanaman komersil. Sebagai konsekuensinya, masyarakat sangatlah rentan terhadap krisis pangan dan kelaparan. Untuk mengatasinya, pemerintah Hindia Belanda mulai memperkenalkan ubi kayu di Jawa dan kacang tanah di Burma sebagai tanaman dan makanan pengganti beras. Di samping itu, fokus pada tanaman komersial membuat masyarakat desa terserap ke dalam volatilitas harga

4) Dalam kasus kontemporer, David Harvey (2005) juga menunjukkan efek dari munculnya neoliberalisme turut andil dalam meningkatkan tingginya kriminalitas di kota-kota besar yang menerapkan sistem neoliberalisme karena berkurangnya sektor pelayanan publik dan tingginya tingkat kemiskinan.

tanaman di tingkat global. Ketika harga karet, lada atau cengkeh misalnya, jatuh di pasaran dunia, maka intensifikasi penanaman padi, sagu atau kentang ditekankan. Demikian juga sebaliknya. Di beberapa kasus pasca kolonial, warisan liberalisme ini masih terjadi dimana liberalisme ekonomi mendorong masyarakat untuk tergiur menanam tanaman komersial demi mendapatkan uang kas, meski masyarakat berada pada kerentanan pangan karena habisnya lahan untuk tanaman komersial, terjeratnya masyarakat ke dalam hutang dan menjadi buruh upahan (Dove, 2011, Li, 2014). Tingginya penyewa tanah di pedesaan dan masyarakat tak bertanah (*land poor*) di pedesaan pada tahun 1905 mencapai di atas 60%. Hal ini tentu menstimulasi meningkatnya migrasi dalam negeri dan urbanisasi. Transformasi besar yang muncul pula adalah berkembangnya buruh upahan (*wage labor*) di pabrik dan perkebunan. Buruknya produktivitas di ranah agrikultur ini menyebabkan tingginya impor beras yang meningkat mulai tahun 1870 hingga 1925 (Booth, 2007: 40-50,60-5).

Masa liberalisme ditandai dengan produksi besar-besaran pada hal apapun. Khususnya produksi pangan, di Burma, meningkatnya produksi beras mendorong pertumbuhan populasi. Hal ini serupa dengan di Jawa selama masa ekonomi liberal, dimana pertumbuhan produksi beras menyebabkan pertumbuhan populasi. Hal yang sama terjadi adalah kemiskinan, karena produksi beras tidak dapat diimbangi dengan pertumbuhan penduduk yang lebih cepat. Semakin banyak penduduk, semakin banyak yang mulut yang harus diberi makan. Disamping itu, intensifikasi produksi belum dikarenakan perkembangan teknologi pertanian, melainkan karena intensifikasi tenaga kerja. Liberalisme menunjukkan bahwa eksploitasi produksi bukannya menghasilkan kekuatan dan ketahanan pangan, namun justru sebaliknya.

b. Terbentuknya Klas menengah “Asing”

Perbedaan karakter semangat pekerja dan tipe modal di Eropa, Asia Timur dan Negara jajahan di Asia Tenggara adalah, di Negara Eropa dan Asia Timur, modal dan buruh tumbuh bersama dalam masyarakat. Sedangkan di Jawa, modal dan buruh yang tumbuh bersama adalah hasil dari dukungan modal dari luar dan tenaga buruh yang murah. Sedangkan di kawasan luar Pulau Jawa, persis pula seperti di Burma, dimana modal dan buruh harus diimpor. Di bawah modal luar dan peminjam uang, masyarakat pribumi diperkenalkan dengan sistem monetisasi, dimana uang mulai menjadi medium pertukaran dan pemasukkan. Karakter ini yang membedakan dengan sistem kapitalisme di Asia Timur (Taiwan, Korea Selatan dan Jepang) dimana pengusaha pribumi muncul dari pergerakan modal yang ada di dalam kawasan itu sendiri, sedangkan modal di negara-negara Asia Tenggara, seperti Filipin, Burma dan Indonesia, Bergeraknya modal tidak lepas dari migrasi orang-orang Cina yang mengisi slot sebagai klas menengah (Booth, 2007: 117-122).

Selain itu, karakter masyarakat plural di negara jajahan berbeda dengan prinsip masyarakat plural di Barat, dimana masyarakat yang berbeda secara ras mempunyai relasi yang sejajar. Berbeda dengan di Negara jajahan, dimana pluralitas didasarkan pada perbedaan ras dan kelas-kelas ekonomi. Dengan demikian, kondisi *supply* dan *demand* dalam politik ekonomi menciptakan keberadaan masyarakat plural. Masyarakat pribumi, migran dan orang Eropa saling berkompetisi. Disamping perpecahan garis ras, masing-masing ras mempunyai mode produksi dan tempat tinggal yang terpisah. Ide tentang masyarakat plural di negara jajahan tidak diiringi dengan hak-hak warga Negara yang sama karena masing-masing komunitas saling berkompetisi dan teratomisasi dalam gelembung-gelembung kehidupan sosial secara terpisah.

Tidak seperti era liberalisme di Jawa yang dimulai pada 1870, persebaran ide percepatan pembangunan terhalang oleh kurangnya modal dalam bentuk tenaga kerja. Oleh karena itu, pemerintah mengimpor kuli dan juga kelas menengah lintah darat (*moneylender*) dari India untuk menstimulasi pertumbuhan ekonomi. Namun demikian, kelas menengah India di Burma lebih cair daripada kelas menengah Cina di Hindia Belanda, karena orang India diijinkan untuk memiliki tanah. Selain itu jenis pekerjaan mereka juga lebih beragam, mulai dokter, peminjam uang, (*chettyar*), pemilik alat produksi penggilingan padi hingga kuli.

Jika kita lihat sampai sekarang, ada keberlanjutan sejarah yang diwariskan dalam ekonomi liberal. Jargon pertumbuhan ekonomi tidak mengucur ke bawah karena aliran-aliran modal hanya mengalir di kalangan atas dan kelas menengah. Untuk kelas menengah dalam konteks Furnivall adalah tentu orang Cina di Hindia Belanda, atau orang India di Burma, yang disebutnya sebagai “middlemen”. Mereka berperan sebagai pemegang uang, pemberi hutang (*money lender*) dan kontraktor terhadap pembangunan-pembangunan yang dijalankan oleh pemerintah. Di Indonesia, keberlanjutan sejarah ini terjadi hingga sekarang pula, dimana posisi orang Cina tak kurang sama dengan posisi-posisi ekonomi yang dipegang sejak perdagangan pra modern Indonesia.

c. Suksesnya Pertumbuhan dan gagalnya kesejahteraan

Pasar mendorong orang untuk terus memproduksi dan menciptakan keuntungan meski harus merusak sosial dan organisme sosial. Disamping itu, pemerintah menekankan sebuah bentuk organisasi sosial kapitalis, dimana kekuatan ekonomi lebih mencolok dibanding permintaan sosial. Semua desa di Jawa dan di Burma, mengalami transformasi ke dalam relasi ekonomi yang didasarkan pada sistem kredit karena hampir semua orang desa kemudian terjebak dalam hutang terhadap lintah tuan tanah, peminjam uang (lintah darat), dan bank. Sepanjang tahun 1923-1940 merupakan bukti nyata semakin senjangnya perbedaan antara pertumbuhan ekonomi (*economic progress*) dan kesejahteraan (*welfare*). Paca berbagai kerusuhan anti India pada sepanjang

tahun-tahun 1930an, kelas menengah India seketika menurun dan banyak modal dan pemegangnya yang lari keluar Burma. Namun volume impor dari India justru meningkat hingga 60%, (Furnivall, 1948: 188-89). Sejak kemerdekaan, yang paling terpenting adalah munculnya kelas menengah pribumi yang rata-rata memiliki alat produksi khususnya penggilingan beras. Mereka mampu mempekerjakan hingga 100 orang. Kemajuan ekonomi tidak ditandai dengan pelayanan dalam ekonomi dan peningkatan kesejahteraan. Kerja-kerja bagian pelayanan publik tidak berjalan sebagaimana cerminan dari kemajuan ekonomi. Kemajuan ekonomi distimulasi dari adanya setiap individu yang saling berkompetisi dan meningkatkan produksi. Namun, peningkatan produksi dari para penanam dan penyewa tanah misalnya, berjalan parallel dengan jumlah hutang mereka kepada kelas menengah India ataupun Cina.

Disamping itu, kesenjangan antara kemajuan ekonomi dan kesejahteraan dapat dilihat dari pola ekspor dan impor yang tidak seimbang karena kebanyakan masyarakat pribumi tidak dapat membeli barang-barang impor yang rata-rata mewah di mata mereka, seperti mesin, sepeda, gramafon, mobil. Impor menyadarkan masyarakat pribumi bahwa ada barang-barang tidak dapat dijangkau oleh mereka. Ambruknya tingkat kesejahteraan ini diperburuk pula dengan kondisi masyarakat plural, baik di Burma maupun Hindia Belanda, dimana masyarakat tidak mempunyai ide tentang kewarganegaraan secara bersama (*common citizenship*) karena ide tentang kelompok ditandai berdasarkan kelas dan ras yang hidup secara terpisah secara sosial.

Anne Booth dalam konsepsinya tentang “kesempatan-kesempatan yang hilang” (*missed opportunities*) membangun hipotesis sekaligus pertanyaan. Hingga tahun 1800, beberapa pelabuhan di Hindia Belanda merupakan tempat pertemuan kosmopolit para pedagang yang saling bertukar komoditas, seperti pelabuhan Makasar, Lombok hingga Ternate. Pertanyaannya kemudian, kesempatan apakah yang hilang dari gagalnya evolusi perkembangan ekonomi di Negara jajahan ini? Salah satu jawaban Anne Booth adalah kebijakan fiskal dan moneter yang hanya meningkatkan pengiriman devisa balik ke Negara Belanda dibanding turun ke masyarakat jajahan. Senada dengan Furnivall, Anne Booth juga menemukan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak diimbangi dengan akselerasi perbaikan kehidupan sosial, khususnya di bidang pendidikan dan kecakapan birokrasi (Booth, 1998: 328-9). Dan momen yang paling terburuk dari “hilangnya kesempatan” adalah terputusnya tradisi dagang (*entrepreneurial culture*) pada masyarakat pribumi karena meningkatnya masyarakat yang kehilangan modal-modal produksi seperti tanah dan kandas dengan kompetisi kelas pedagang menengah yang dikuasai oleh komunitas Cina. Booth juga mensinyalir bahwa munculnya politik etis yang diterapkan pada tahun 1901 bukan untuk memberikan mobilitas sosial ekonomi warga pribumi, melainkan untuk mengakselerasikan masyarakat ke kekuatan pasar dunia dan lebih terlibat ke dalam sistem ekonomi komersial (Booth, 2007: 127)

Terbukanya pintu untuk perdagangan bebas menyebabkan masyarakat Hindia Belanda juga terimbas pada krisis ekonomi dunia. Di tahun 1930, krisis ekonomi menyebabkan turunnya pembelian gula yang diekspor dari Hindia Belanda. Di tingkatan lokal, krisis ekonomi ini sangat terasa di perdesaan-perdesaan di Jawa karena terjadi deflasi dimana produksi tanaman komersial meningkat, namun ekspor mengalami kemacetan (Booth, 1998: 40). Implikasi terkena imbasnya masyarakat akibat anjloknya harga gula di pasaran dunia ini sekaligus menunjukkan bahwa masyarakat Jawa telah tercerabut dari tanahnya dan menyerahkan tenaga kerjanya dengan bekerja di pabrik-pabrik. Sensus tahun 1930 menunjukkan bahwa 34% laki-laki dan 41% perempuan di Jawa telah memutuskan bekerja di sektor non pertanian. Data yang paling mengejutkan adalah, dalam total nasional, angka perempuan yang bekerja di sektor non-pertanian justru lebih tinggi dibanding laki-laki. Jumlah perempuan yang bekerja di sektor manufaktur bahkan mencapai 67% (ibid, 46,67). Hal ini sekaligus menunjukkan reinterpretasi Marx yang dilakukan oleh beberapa penafsir ulang Marxisme seperti filosof Terry Eagleton (2011) hingga etnografer Aihwa Ong (1987) menemukan bahwa perempuan adalah golongan yang berada di garda depan ketika terjadi transformasi liberalisasi ekonomi. Tingkat disparitas pendapatan sangat tajam antara buruh dan pegawai pemerintah dan jumlah angka kemiskinan lebih banyak didominasi oleh perempuan yang bekerja sebagai buruh di perkotaan. Meski para pekerja dalam pandangan Marx pada waktu itu bukanlah pekerja pabrik, melainkan pekerja perempuan di sektor domestik yang mengalami pemiskinan.

Kesimpulan

Pertumbuhan liberalisme pasca kolonial merupakan tahap lanjut dari keadaan yang demikian buruk pasca perang. Secara global, contoh liberalisme ekonomi dilandaskan oleh kesepakatan pasca perang semacam *Bretton Woods* dan *Washington Consensus* yang bertujuan untuk mendesain meningkatkan perdagangan, namun pada saat yang sama mengontrol perputaran modal Negara pasca colonial dibatasi dan dipaksa mengalir ke Negara-negara kaya (OECD). Dalam gambaran umumnya, kebutuhan akan pertukaran pasar global menyebabkan desakan terhadap Negara untuk meminimalisir campur tangannya dalam meregulasi perdagangan. Salah satu subjek pendesak liberalisme ekonomi terhadap Negara adalah lembaga-lembaga keuangan internasional yang lebih besar semacam IMF dan Bank Dunia. Dua lembaga ini bahkan mempunyai jumlah uang yang lebih besar dari postur GNP (*Gross National Product*) negara-negara pascakolonial. Namun keduanya bukan berarti mengharuskan bahwa Negara lepas dalam mengatur pasar, sebaliknya menekan perlunya institusi-institusi untuk meregulasi liberalisme pasar, salah satu contohnya adalah menciptakan institusi-institusi deregulasi perbankan dan desentralisasi.

Konsep tentang liberalisme ekonomi bukanlah benar-benar pasar bebas karena berbagai kebijakan tentang penerapan liberalisme ekonomi masih berada di bawah kontrol aliansi lembaga keuangan internasional dan Negara. Berbagai Negara pascakolonial yang menjalankan ekonomi neoliberal harus berhadapan dengan barang-barang impor, semacam beras dan jagung yang telah disubsidi penuh oleh pemerintah di Negara maju. Liberalisme ekonomi merupakan agenda penting rejim imperium yang salah satu program besarnya adalah menghindari kebijakan-kebijakan keadilan sosial dan distributif terhadap warga di Negara jajahan karena kebijakan politik sosialisme, kesejahteraan dan pemerataan akan menghambat distribusi produk ekspor yang dilakukan oleh Amerika Serikat dan Inggris misalnya.

Senada dengan kasus di Indonesia, liberalisme tidak diciptakan melalui mekanisme regulasi dalam diri pasar bebas itu sendiri, melainkan dalam Negara terdapat berbagai kepentingan yang kemudian memproduksi proses pasar. Dengan kata lain, liberalisme dihasilkan melalui konstruksi politik. Robison memberikan contoh jelas bahwa selama Orde Baru pasar dan modal di Indonesia diciptakan oleh militer dan birokrasi, yang mendapatkan dukungan dari organisasi politik semacam Golongan Karya. Kompleksitas korporatisme Negara ini yang kemudian menciptakan bentuk pasar ekonomi makro. Kasus liberalisme di Indonesia menunjukkan bahwa inisiator dari pasar bebas adalah Negara. Mengingat Indonesia tidak mempunyai kelas menengah pengusaha yang kuat dalam mendesak terciptanya liberalisme ekonomi. Aparatus Negara yang memegang dan menggerakkan modal (Kunio, 1988, Robison, 1986). Namun demikian, modal dan pertumbuhan ekonomi sepenuhnya digerakkan oleh ketidakefektifan birokrasi. Impor dan ekspor, sistem kredit, tidak diserahkan dalam mekanisme pasar sepenuhnya, melainkan dimonopoli oleh beberapa kalangan yang dekat dengan birokrasi. Dengan kata lain, dalam pandangan kaum liberal, kapitalisme seharusnya digerakkan oleh individual kelas menengah dan pengusaha kelas atas yang mempunyai pilihan-pilihan rasional terhadap ekonomi. Namun demikian, di Indonesia kelas menengah tidak membangun institusi kapital yang kuat sehingga rejim yang korup dan oligarkis mengatur perputaran modal dalam negeri. Pada saat yang sama pertumbuhan ekonomi Indonesia mengalami peningkatan yang pesat hingga masa Orde Baru. Kelas menengah Indonesia dan teknokrat berada dalam pusat genggam kekuasaan. Pandangan Robison ini sekaligus mengkritik teori-teori ketergantungan yang dikembangkan oleh Gunder Frank (1975: 29-38), dan di Indonesia banyak didiskusikan oleh Sritua Arif dan Adi Sasono (1981) yang melihat bahwa liberalisme ekonomi lebih dikarenakan tekanan pasar global yang menyebabkan ketergantungan masyarakat dunia selatan terhadap pasar di belahan utara. Liberalisme ekonomi merupakan kepentingan elit dalam negeri dalam memonopoli berbagai aliran keuangan, substitusi impor dan berbagai proses berjalannya pasar bebas. Pasca runtuhnya rejim

Soeharto, pasar bebas dibajak oleh oligarki kapitalisme dimana keluarga-keluarga birokrasi, militer dan partai politik beraliansi dengan klas pengusaha dan menentukan gerak pasar ekonomi Indonesia (Robison&Hadiz, 2004)

Liberalisasi ekonomi memang terjadi pada Negara miskin dan bekas jajahan, dan khususnya diterapkan pada masyarakat miskin, namun pasar bebas tidak benar-benar terjadi pada investor kaya karena mereka dilindungi oleh undang-undang Negara. Demikian pula, liberalisme ekonomi sebenarnya tidak terjadi pada Negara-negara kaya, karena kuatnya proteksi dari Negara. Efek dari liberalisme pada Negara pasca kolonial sebenarnya mirip dengan apa yang terjadi pada masa kolonial. Namun beberapa transformasi adalah adalah meningkatnya hutang Negara miskin yang berakibat ditariknya subsidi untuk kesejahteraan.

Dengan demikian, esensi yang terjadi pada kolonialisme dan pasca kolonialisme adalah liberalisme tetap menghasilkan kemiskinan struktural di tingkatan masyarakat bawah. Salah satu alasannya adalah sumber penghasilan Negara dari ekspor yang seharusnya untuk dialokasikan ke dana publik Negara digunakan untuk pembayaran hutang dan alokasi kucuran dana terhadap bank-bank swasta. Masyarakatlah yang harus menanggung pengurangan subsidi. Efek terhadap masyarakat miskin sangat terasa karena liberalisme ekonomi menswastanisasi semua sektor publik, seperti telekomunikasi, jalan hingga pendidikan. Efeknya produktivitas ekonomi menurun karena banyak masyarakat yang tercabut dari modal produksi penting seperti air, tanah dan hutan. Dan juga menurunnya kualitas hidup, karena pengurangan dana untuk fasilitas infrastruktur, pendidikan, kesehatan dan air bersih untuk publik. Liberalisme ekonomi pada tingkatan ekstrim seperti di Negara sub Sahara Afrika dan Amerika Tengah, telah menyebabkan rawan pangan hingga kelaparan dan meningkatnya kriminalitas (Sader, 2008, Wood, 2009). Distribusi pendapatan Negara dalam kebijakan sosial dikurangi dan berimplikasi pada buruknya kualitas hidup manusia. Tidak hanya di Indonesia, subjek liberalisme ekonomi juga ditujukan pada negara-negara berkembang di benua Amerika Latin, seperti Meksiko, Chile, Haiti dan Kolumbia yang bertujuan untuk menegakkan demokrasi dan perdagangan bebas dengan melakukan berbagai embargo dan bantuan terhadap kudeta militer yang disepakati oleh Amerika Serikat. David Graeber (2007) dalam studi etnografinya menunjukkan bahwa akibat alokasi pembayaran hutang, terdapat sekitar 5000 lebih masyarakat Madagaskar yang meninggal akibat malaria karena hilangnya subsidi terhadap obat pemberantasan nyamuk.

Sebagai penutup, saya berupaya menegaskan posisi terhadap efek dari liberalisme ekonomi. Pola pasar bebas ini secara sejarah telah menunjukkan pemiskinan struktural yang diakibatkan kebijakan pasar bebas disahkan secara legal melalui institusi Negara. Liberalisme ekonomi menciptakan peningkatana ekonomi (*economic growth*) namun meninggalkan kesejahteraan

(*welfare*). Di tingkatan suprastruktur, liberalisme ekonomi menghasilkan bentuk demokrasi yang bermasalah karena sistem demokrasi dijalankan seiring dengan meningkatnya konsentrasi kekayaan pada segelintir elit dan masyarakat kelas bawah yang menjadi mayoritas pemilih. Dengan demikian, demokrasi menjadi bentuk penekanan segelintir kelas elit.

Sebagai kesimpulan, inti keberhasilan liberalisme dan neoliberalisme adalah pada kemajuan ekonomi (*economic progress*) tapi gagal dalam kesejahteraan (*welfare*). Ini adalah dua konsep yang berbeda. Kesejahteraan sangat subjektif dan tidak mudah dihitung berdasarkan hitungan kemajuan ekonomi. Dengan kata lain kesejahteraan tidak dapat dihitung dengan material semata. Untuk menganalisa kesejahteraan, kita harus menemukan relasi antara pemasukkan dan pembelanjaan individual (*individual budgets of income and expenditure*) dengan jumlah hutang, dan korelasinya dengan kondisi sosial seperti keterlibatan dalam proses-proses hukum dan peradilan, kriminalitas, kesehatan, pendidikan dan aspek budaya seperti agama. Kesejahteraan sangatlah subjektif karena konsep perhitungannya bersifat partikuler dan tergantung pada siapa yang mengajukan ide tersebut. Sebagai misal, ide tentang keamanan, perdamaian, kebahagiaan, dan ketertiban adalah ide yang bagus dan bersifat universal, namun jika itu diusung dan diatur oleh kekuatan dan kehendak asing, maka belum tentu ia diterima dengan baik. Demikian juga dengan ide belakangan ini yang muncul tentang feminisme dan multikulturalisme. Sedangkan konsep kesejahteraan dalam masyarakat Burma misalnya, adalah keterlibatan antara kepuasan individual dengan kohesi sosial dan kebutuhan religius, sedangkan konsep kemajuan dalam masyarakat Barat sangatlah sekuler, dimana hanya terfokus pada ekonomi semata. Liberalisme ekonomi mirip dengan sekularisasi agama, yang hendak memisahkan antara satu elemen dengan elemen lainnya. Padahal sistem ekonomi di Negara kolonial tertanam dalam organisasi sosial dan keagamaan. Sedangkan konsep kesejahteraan menurut masyarakat Barat adalah dengan cara menyediakan pendidikan modern dan departemen-departemen modern seperti sains pertanian, kesehatan modern dan regulasi-regulasi sanitasi. Dalam kenyataannya tidak semua kebijakan pembangunan kesejahteraan menurut konsep barat ini dapat diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, karena bagi masyarakat Burma, pelayanan sosial hanya bertujuan untuk keuntungan individu dan tidak berelasi dengan kesejahteraan secara sosial.

Liberalisme menghasilkan pertumbuhan ekonomi, namun gagal mencapai kesejahteraan, karena pemerintah kolonial gagal untuk memahami apa itu makna kesejahteraan dari sudut pandang masyarakat. Sebagai hasilnya, di periode akhir kolonial, jarak relasi antara Negara dengan masyarakatnya semakin lebar. Mengacu pada diskusi sejarah ekonomi di Hindia Belanda, sistem ekonomi liberalisme menempatkan kemajuan ekonomi namun berakhir dengan pemiskinan masyarakat dan rasisme. Furnivall percaya bahwa mode

produksi ekonomi menentukan konsolidasi relasi sosial. Di salah satu paragraf yang kuat, ia mengatakan sebagai berikut: *A plural society is comprising two or more elements or social orders which live side by side, yet without mingling in one political unit* (Furnivall, 1939: 446). Liberalisme ekonomi menghasilkan kasta-kasta ekonomi yang tidak hanya berdasarkan perbedaan kelas, namun juga ras. Terjadi kebekuan pada mobilitas kelas dan relasi sosial, mengingat masing-masing komunitas kelas memainkan peranannya masing-masing. Kelompok Cina adalah penyedia pinjaman uang kas, masyarakat pribumi adalah kuli dan masyarakat Eropa menguasai perdagangan, administrasi dan hukum. Sedangkan masyarakat pribumi adalah golongan yang dianggap paling rendah. Pandangan kolonial melihat bahwa masyarakat pribumi mempunyai respons yang rendah terhadap investasi modal. Sehingga banyak yang menganggap bahwa masyarakat pribumi adalah orang yang malas. Masyarakat yang terlibat dalam sistem pertanian dianggap tidak mempunyai hasrat untuk meningkatkan perkembangan ekonomi. Demikian juga, mereka yang bekerja di ranah administrasi, seperti pegawai desa dianggap kurang mempunyai inisiatif, kecuali jika mendapatkan instruksi keras dari atasan mereka. Realitas pembagian masyarakat terhadap ras dan etnis, dan kuatnya pengelompokan etnis pasca kolonial adalah hasil dari formasi kolonial yang dapat kita rasakan hingga pada saat ini.

Referensi

- Andaya, Leonard (1993). *The World of Maluku: Eastern Indonesia in the Early Modern Period*. University of Hawaii at Manoa.
- Arief, Sritua, and Adi Sasono (1981). *Indonesia, dependency and underdevelopment*. Kuala Lumpur, Malaysia: Published for the Institute for Development Studies, Jakarta, Indonesia by META.
- Boeke, J. H. (1953). *Economics and economic policy of dual societies, as exemplified by Indonesia*. New York: International Secretariat, Institute of Pacific Relations.
- Boomgard, Peter, and Jan Luiten van Zanden (1990). *Changing economy in Indonesia 10, 10*. Amsterdam: The Royal Tropical Institute.
- Booth, Anne (1998). *The Indonesian economy in the nineteenth and twentieth centuries a history of missed opportunities*. New York: St. Martin's Press in association with the Australian National University, Canberra.
- Booth, Anne (2007). *Colonial legacies economic and social development in East and Southeast Asia*. Honolulu: University of Hawaii Press.
- Dove, Michael (2011). *The banana tree at the gate a history of marginal peoples and global markets in Borneo*. New Haven [Conn.]: Yale University Press.
- Eagleton, Terry (2011). *Why Marx was right*. New Haven: Yale University Press.
- Frank, Andre Gunder (1975). *On capitalist underdevelopment*. Bombay: Oxford University Press.
- Furnivall, J.S. (1939). *Netherlands India: a study of plural economy*. Cambridge: Cambridge University Press, 1939)
- Furnivall, J.S. (1948). *Colonial Policy and Practice: A Comparative Study of Burma and*

- Netherlands India* (Cambridge: Cambridge University Press, 1948).
- Graeber, David (2007). *Lost people magic and the legacy of slavery in Madagascar*. Bloomington: Indiana University Press
- Harvey, David (2005). *A brief history of neoliberalism*. Oxford: Oxford University Press.
- Harvey, David (2012). *Rebel cities: from the right to the city to the urban revolution*. New York: Verso.
- Knaap, Gerrit J. (2003). "Headhunting, Carnage and Armed Peace in Amboina, 1500-1700". *Journal of the Economic and Social History of the Orient*, 46(2), pp. 165-192
- Leur, Van (1955). *Indonesian Trade and Society*. W. Van Hoeve Publishers.
- Li, Tania (2014). *Land's end: capitalist relations on an indigenous frontier*. Duke University Press. Durham, NC.
- Lindblad J.Th. (1996). Business strategies in late colonial Indonesia. In: Lindblad J.Th. (Ed.) *Historical foundations of a national economy in Indonesia, 1890s-1990s*. Amsterdam: North-Holland. 207-228.
- Ong, Aihwa (1987). *Spirits of resistance and capitalist discipline factory women in Malaysia*. Albany: State University of New York Press.
- Polanyi, Karl (2001). *Great Transformation. The Political Economic Origins of Our Time*. Beacon Press.
- Ricklefs, Merle Calvin (2001). *A History of Modern Indonesia Since C. 1200*. Third Edition. Stanford University California.
- Robison, Richard (1986). *Indonesia: the rise of capital*. Sydney: Allen & Unwin.
- Robison, Richard, and Vedi R. Hadiz (2004). *Reorganising power in Indonesia: the politics of oligarchy in an age of markets*. London: RoutledgeCurzon
- Sader, Amir (2008). "The Weakest Link?," *New Left Review*, 52 July-August.
- Scott, James (1979). *The Moral Economy of the Peasant: Rebellion and Subsistence in Southeast Asia*. Yale University Press.
- Smith, Adam (1990). *An inquiry into the nature and causes of the wealth of nations*. Raleigh, N.C.: Alex Catalogue.
- Stoler, Ann Laura Stoler (1995). *Capitalism and Confrontation in Sumatra's Plantation Belt, 1870-1979*. University of Michigan Press.
- Well, Kathirithamby (1992). "The Age of Transition: The mid-Eighteenth to the Early Nineteenth Century", dalam Nicholas Tarling (ed), *The Cambridge History of Southeast Asia: From early times to c. 1800, Volume 1* (pp. 599-600). Cambridge University Press.
- Wood, Tony (2009). "Latin America Tamed?," *New Left Review*, 58, July-August.
- Yoshihara, Kunio (1988). *The rise of ersatz capitalism in South-East Asia*. Singapore: Oxford University Press.